

Ahmad Junaidi, Sarwititi Sarwoprasodjo, Didik Suharjito, Ika Yuliasari:
Journalist-Victim Relationship: Analysis of Cyber Media Reporting on the Land Conflict of the Sunda Wiwitan Indigenous Community
Hubungan Jurnalis-Korban: Analisis Pemberitaan Media Siber tentang Konflik Lahan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan

Journalist-Victim Relationship: Analysis of Cyber Media Reporting on the Land Conflict of the Sunda Wiwitan Indigenous Community

Hubungan Jurnalis-Korban: Analisis Pemberitaan Media Siber tentang Konflik Lahan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan

Ahmad Junaidi¹, Sarwititi Sarwoprasodjo², Didik Suharjito³, Ika Yuliasari⁴

¹Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Gedung FEMA W1-L2, Kampus IPB Dramaga, Jl. Kamper, Babakan, Kec Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*

Email: ahmadjunaidi@apps.ipb.ac.id

²Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Gedung FEMA W1 -L2., Kampus IPB Dramaga, Jalan Kamper, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Email: sarwititi@apps.ipb.ac.id

³Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Gedung FEMA W1 -L2., Kampus IPB Dramaga, Jalan Kamper, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Email: didiks@apps.ipb.ac.id

⁴Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Jayabaya, Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23 4, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210

Email: syulia192@gmail.com

Masuk tanggal : 18-02-2024, revisi tanggal : 17-07-2024, diterima untuk diterbitkan tanggal : 22-07-2024

Abstract

The relationship between journalists and sources influences reporting on conflicts in media. The news media's portrayal of conflicts can shape public opinion, which in turn can influence policy decisions. Governments and other stakeholders often pay close attention to media coverage and public reaction when making decisions related to conflicts. This study analyzes how the relationship between journalists and sources, in this case the victims from the Sunda Wiwitan indigenous community in Cigugur, West Java, in online media, relates to the land conflict and how it influences the resolution of the case. The researcher chose the theme of Sunda Wiwitan in relation to online media and conflict because the land conflict involving the Sunda Wiwitan indigenous community in Cigugur, West Java, is an issue that has received widespread media attention. Online media, with its fast and broad reach, often covers this conflict, although frequently in the form of short news pieces (hard news). This study uses a qualitative approach, employing a mixed method of content analysis, in-depth interviews which involving journalists and members of Sunda Wiwitan Community. The researchers analyze 113 news articles from national and local online media about the Sunda Wiwitan land conflict from 2020-2022. This study aims to examine how the relationship between victims in land conflicts and influential journalists affects media framing and agenda-setting. The research shows cyber media are interested to cover the issue as it carries news value of conflict and produce more news in form of hard news that features. The communication established between journalists or the media and victims or sources from the Sunda Wiwitan indigenous community influences the formation of media agendas and framing. The significant attention from online media and diverse sources influenced policy decisions regarding the Sunda Wiwitan land conflict.

Keywords: *agenda-setting, conflict, communication, journalist, sources*

Abstrak

Hubungan antara jurnalis dan narasumber mempengaruhi pemberitaan terkait konflik di media. Penggambaran konflik dalam media dapat membentuk opini publik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan kebijakan. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sering memperhatikan liputan media dan reaksi publik saat membuat keputusan yang terkait dengan konflik. Peneliti mengambil tema Sunda Wiwitan dalam kaitannya dengan media siber dan konflik karena konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat Sunda Wiwitan di Cigugur, Jawa Barat, merupakan isu yang mendapatkan perhatian luas dari media. Media siber, dengan sifatnya yang cepat dan luas jangkauannya, sering meliput konflik ini, namun sering kali dalam bentuk berita pendek (*hardnews*). Penelitian ini menganalisis bagaimana hubungan jurnalis dengan narasumber dalam hal ini korban yakni masyarakat adat Sunda Wiwitan, Cigugur, Jawa Barat di media online terkait konflik lahan yang akhirnya berpengaruh pada penyelesaian kasusnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode campuran analisis isi, wawancara mendalam yang melibatkan jurnalis dan anggota komunitas Sunda Wiwitan. Peneliti menganalisis 113 berita dari media siber nasional dan lokal mengenai konflik lahan Sunda Wiwitan mulai tahun 2020 sampai dengan 2022. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan korban dalam konflik lahan dengan jurnalis berpengaruh dalam bingkai dan pembentukan agenda media. Penelitian ini menunjukkan banyak media siber yang tertarik menulis konflik lahan Sunda Wiwitan dalam bentuk tulisan pendek (*hardnews*) daripada tulisan panjang dan mendalam (*features*) dan penelitian ini juga menemukan adanya hubungan yang baik antara jurnalis dan korban yang mempengaruhi banyaknya liputan dan wawancara dengan narasumber dari pihak Sunda Wiwitan. Komunikasi yang terjalin antara jurnalis atau media dengan korban atau narasumber dari komunitas adat Sunda Wiwitan mempengaruhi dalam pembentukan agenda dan framing media. Perhatian yang besar dari media siber dan narasumber-narasumber yang beragam berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan terhadap konflik lahan Sunda Wiwitan.

Kata Kunci: *agenda-setting, jurnalis, komunikasi, konflik, narasumber*

Pendahuluan

Konflik komunitas merupakan konflik di arena publik yang muncul karena perbedaan pandangan di mana pihak-pihak mendeskripsikan pihak lain sesat yang bisa terjadi dalam entitas kecil, misalnya sebuah komunitas atau sekumpulan orang yang mendiami lokasi tertentu dengan identitas kultural dan minat yang sama. Konflik komunitas sering berkelindan dengan faktor lain yang membuat pertentangan semakin tajam seperti agama dan politik (Cruikshank, 2018). Perbedaan bahasa dan agama banyak menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman dan berujung pada munculnya konflik.

Munculnya konflik antar-komunitas juga disebabkan beberapa seperti ketidaksetaraan kelembagaan, kekuatan dalam kelompok, tekanan lingkungan, ketidakseimbangan kekuasaan dan kekurangan sumberdaya (Massey & Miller, 2018). Persaingan penguasaan atas sumberdaya, seperti lahan dan air, juga memicu konflik antar komunitas.

Di Indonesia, kekerasan terhadap komunitas minoritas sering kali tak bisa dilepaskan dari persoalan agama-agama yang diakui negara. Banyak penelitian tentang konflik komunal di Indonesia yang terjadi di awal reformasi setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Suharto menyimpulkan besarnya pengaruh faktor patronase dalam menggiring kearah kekerasan. Patronase yang kolusif tidak hanya menghalangi pembangunan di beberapa wilayah namun juga memicu konflik etnis (Regus UNIKA St Paulus Ruteng, 2020; Suryana, 2018; Tyson, 2013) Kekerasan berbasis identitas terus terjadi di beberapa wilayah karena beberapa penyebab utama dari konflik yang lebih besar belum terselesaikan. Ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan, militansi agama dan etnis bisa memberi organisasi-organisasi alat untuk mendapatkan kekuatan dalam sistem patronase, namun penggunaannya bisa menimbulkan ketegangan antar kelompok dan memicu konflik etnis.

Dalam masyarakat yang terdampak konflik, jurnanisme berperan penting dalam membentuk persepsi dan pengetahuan publik tentang identitas nasional, sejarah, konflik dan upaya-upaya perdamaian. Ketika memediasi konflik, jurnalis tidak hanya menebarkan informasi namun juga mendefinisikan, menframing, mengolah dan mempromosikannya. Jurnalis menjadi faktor kunci dalam mediasi informasi dalam masa konflik maupun pasca konflik (Lynch, 2005; Şahin, 2022)

Agenda setting media menjadi faktor yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan politik (Geiß, 2022; Herfroy-Mischler, 2015; Koltsova, 2020). Semakin tinggi liputan media tentang konflik akan semakin berpengaruh terhadap agenda setting publik. Karya-karya jurnalistik terjadi melalui proses yang Panjang mulai dari kejadian yang dikumpulkan, ditulis oleh reporter lapangan, disunting oleh editor dan diterbitkan oleh media.

Sebagaimana dalam teori Agenda-Setting yang dikemukakan oleh Maxwell McComb dan Donald Shaw, dalam menentukan dan menseleksi berita, sudut pandang, media dalam hal ini para gatekeeper seperti redaktur dan pemimpin redaksi melakukan framing dan agenda setting atas suatu peristiwa atau isu. Hubungan narasumber dan *gatekeeper* berpengaruh dalam menentukan framing dan agenda media (Atanesyan, 2020). Berita yang dihasilkan dengan melalui framing dan agenda setting kemudian menjadi agenda publik dan kemungkinan bisa menjadi kebijakan publik. Narasumber juga berpengaruh pada agenda publik dan kebijakan publik.

Era digital saat ini, ditandai dengan mudahnya warga memperoleh informasi melalui media-media yang berbasis internet dan media sosial, seperti facebook, twitter dan lain-lain. Kemudahan memperoleh informasi membuat sebagian masyarakat juga mengalami kesulitan menyaring informasi yang akurat. Namun, kemudahan mendapatkan informasi ini dibarengi dengan meningkatnya pemberitaan tentang konflik (Christensen & Khalil, 2023). Pemberitaan tentang konflik dapat memperburuk pembelahan dalam masyarakat yang pada akhirnya memperburuk konflik. Pemberitaan tentang konflik dengan cepat menyebar di era digital.

Konflik dianggap penting untuk menentukan apakah sebuah peristiwa diterbitkan di media massa atau tidak. Berita mengenai konflik mendominasi pemberitaan bertemakan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) dalam pemberitaan media siber (Susanto et al., 2020). Berita-berita bertema harmoni dan

perdamaian lebih sedikit ditemukan dalam karya-karya jurnalistik media di dalam media, termasuk media siber.

Media siber adalah media massa yang menggunakan teknologi internet dalam penyampaian pesan berupa teks, foto, ilustrasi, video, dan lain-lain. Media siber juga disebut sebagai media baru (*new media*) untuk membedakannya dengan media-media konvensional sebelumnya seperti media cetak (koran, majalah, dan tabloid) atau media penyiaran (televisi dan radio) (Romli, A., 2020). Karakteristik yang membedakan media siber dengan media konvensional lainnya adalah ia menjangkau khalayak yang lebih luas, melampaui batas-batas wilayah, daerah dan negara; lebih cepat karena penyajiannya *real time* (pada saat yang sama) dan lebih interaktif dengan khalayaknya. Khalayak mengakses media siber melalui komputer, laptop, dan gawai.

Media siber saat ini menjamur di Indonesia dengan perkiraan jumlahnya di tahun 2019 menurut data Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mencapai lebih dari 47.000 dan yang terverifikasi Dewan Pers sebanyak 2,700 media (amsi.or.id, 2019). Besarnya jumlah media siber memicu persaingan yang pada akhirnya bukan Cuma menurunkan kualitas karya-karya jurnalistiknya melainkan juga berpotensi menimbulkan dan memperburuk konflik yang terjadi pada komunitas.

Peneliti mengambil tema Sunda Wiwitan dalam kaitannya dengan media siber dan konflik karena konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat Sunda Wiwitan di Cigugur, Jawa Barat, merupakan isu yang mendapatkan perhatian luas dari media. Media siber, dengan sifatnya yang cepat dan luas jangkauannya, sering meliput konflik ini, namun sering kali dalam bentuk berita pendek (*hardnews*).

Penelitian ini menganalisis berita-berita tentang konflik lahan komunitas adat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat juga banyak mendapatkan tempat di media siber. Penelitian ini juga ingin menjawab pertanyaan mengapa media siber berskala nasional maupun lokal tertarik memberitakan konflik terkait komunitas adat Sunda Wiwitan dan bagaimana hubungan jurnalis dan korban dalam hal ini komunitas adat Sunda Wiwitan berpengaruh terhadap pemberitaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hubungan antara jurnalis dan narasumber, khususnya korban dari masyarakat adat Sunda Wiwitan, mempengaruhi pemberitaan media siber terkait konflik lahan di Cigugur, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan ini mempengaruhi penyelesaian kasus konflik lahan tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang pentingnya hubungan yang baik antara jurnalis dan narasumber dalam mempengaruhi agenda media dan kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendorong liputan yang lebih adil dan akurat, serta untuk meningkatkan pemahaman tentang peran media dalam konflik komunal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Studi kasus dianggap cocok untuk menjawab permasalahan penelitian “bagaimana” dan “mengapa” (Loisa, 2019) Studi kasus adalah suatu penelitian empiris yang mengkaji fenomena dalam kehidupan nyata ketika batas-batas antara fenomena tidak tegas dan sumber penelitian yang digunakan bersifat jamak. Studi kasus dapat menggunakan bukti-bukti kuantitatif maupun kualitatif. Yin mengatakan metode studi kasus dapat digunakan pada penelitian atas karya jurnalistik untuk menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”.

Langkah pertama adalah mengumpulkan data melalui analisis isi, wawancara mendalam, dan focus group discussion (FGD). Data dikumpulkan dari berita-berita konflik komunitas adat Sunda Wiwitan Cigugur yang dimuat media siber sepanjang 2019-2022 menggunakan mesin pencari Google dan aplikasi Python. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "Sunda Wiwitan," "Cigugur," "Disegel," dan "Kabupaten Kuningan."

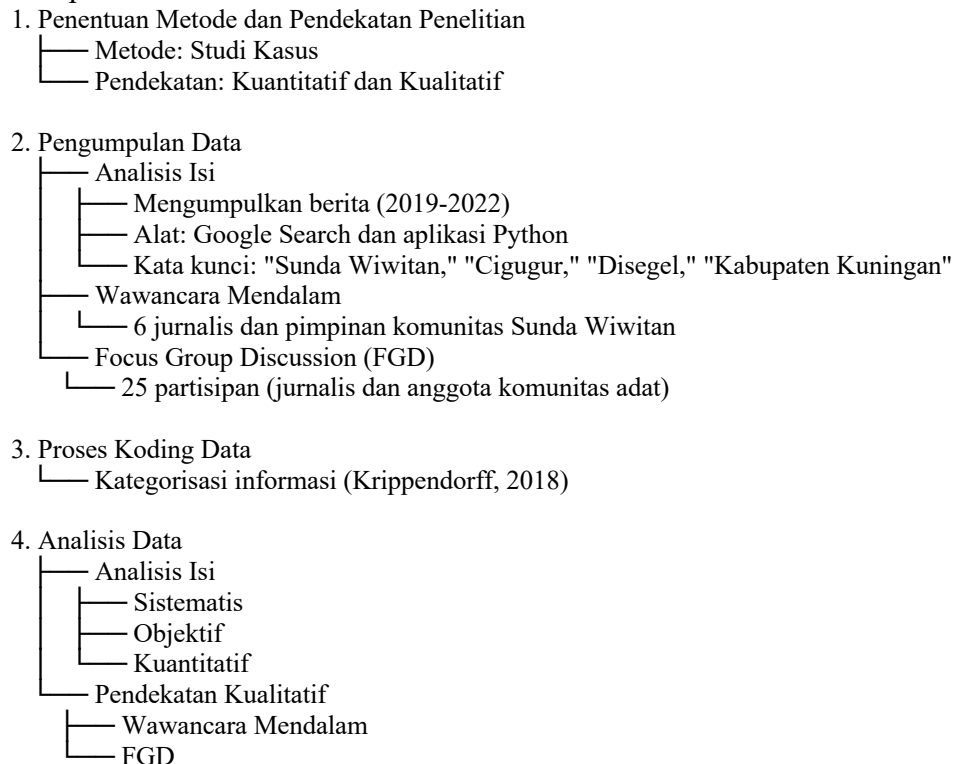
Tahapan selanjutnya melibatkan wawancara mendalam dengan enam orang jurnalis dan pimpinan komunitas Sunda Wiwitan. Selain itu, peneliti juga mengadakan FGD yang mengundang 25 partisipan yang terdiri dari jurnalis dan anggota komunitas adat. Data yang terkumpul kemudian dilakukan proses koding untuk mengategorikan informasi (Krippendorff, 2018).

Data penelitian diperoleh melalui beberapa cara. Pertama, menggunakan Google Search dengan kata kunci yang relevan untuk mengumpulkan berita. Kedua, menggunakan aplikasi Python untuk mempermudah pengunduhan dan pengorganisasian berita. Ketiga, melakukan wawancara mendalam dengan jurnalis dan pimpinan komunitas Sunda Wiwitan. Terakhir, mengadakan FGD dengan partisipan dari kalangan jurnalis dan komunitas adat untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam.

Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis isi dan pendekatan kualitatif. Analisis isi dilakukan untuk memeriksa isi dari informasi yang direkam secara sistematis, objektif, dan kuantitatif guna mengukur variabel tertentu. Proses koding digunakan untuk mengategorikan data berita yang dikumpulkan. Pendekatan kualitatif melibatkan wawancara mendalam dan FGD untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang hubungan antara jurnalis dan narasumber serta pengaruhnya terhadap pemberitaan dan kebijakan publik.

Peneliti mengadakan FGD yang mengundang 25 partisipan yang terdiri dari jurnalis dan anggota komunitas adat dan melakukan wawancara mendalam dengan enam orang jurnalis dan pimpinan komunitas Sunda Wiwitan.

Bagan Tahapan Penelitian:



Hasil Penemuan dan Diskusi

Komunitas adat Sunda Wiwitan adalah subetnis yang memiliki kepercayaan dan tradisi yang berbeda dengan mayoritas etnis Sunda, Jawa Barat. Ada lebih dari tiga ratus kelompok etnis di Indonesia. Pengelompokan etnis bisa lebih lebar kalau memasukkan beberapa kelompok atau subkelompok yang dianggap berbeda, misalnya Cirebon, Banten, atau Baduy yang dipandang sebagian orang tidak bisa dimasukkan dalam etnis Sunda meski memiliki kesamaan bahasa (Liliweri, 2018)

Komunitas adat Sunda Wiwitan bertempat di desa Cigugur, kecamatan Cigugur, kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kepercayaan Sunda Wiwitan didirikan oleh Pangeran Madrais Alibasa Widjaja Ningrat pada tahun 1848 yang dikenal juga dengan Agama Jawa Sunda atau Madraisme (Merdeka.com, 2020). Pengikut Sunda Wiwitan ini kemudian menyebar ke berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Bandung, Garut, Majalengka, Ciamis bahkan sampai Jakarta. Sejarah konflik yang melibatkan pengikut Sunda Wiwitan dimulai sejak jaman penjajahan Belanda. Pangeran Madrais dan pengikutnya sempat ditahan karena dianggap kelompok radikal.

Masih eksisnya Sunda Wiwitan, menurut Dadan Wildan dalam artikel "Perjumpaan Islam dengan Tradisi Sunda", dikarenakan komunitas penganut taat ajaran Sunda Wiwitan secara sadar memisahkan diri dari masyarakat Sunda lain ketika Islam masuk ke Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ini terdapat dalam cerita Budak Buncireung, Dewa Kaladri, dan pantun Bogor versi Aki Buyut Baju Rambeng dalam lakon Pajajaran Seureun Papan (Teguh, Irfan, 2017). Komunitas Sunda

Wiwitan memiliki tradisi Serentaun yang merupakan perayaan tahun baru Sunda sekaligus pesta panen padi. Perayaan ini telah menjadi agenda pariwisata tahunan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang banyak dihadiri wisatawan lokal maupun manca negara. Meskipun ada penerimaan terhadap tradisi Serentaun, konflik masih terjadi di tingkat lokal.

Di awal tahun 2020, dengan alasan desakan masyarakat lokal, pemerintah kabupaten Kuningan menyegel pembangunan makam leluhur komunitas adat Sunda Wiwitan terlepas pada awalnya mereka sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Bbc.indonesia.com, 2020). Pembangunan makam yang direncanakan untuk pimpinan Sunda Wiwitan yakni Pangeran Jatikusumah, dianggap tidak sesuai dengan agama mayoritas warga di sekitar Cigugur dan Kabupaten Kuningah pada umumnya. Diskriminasi juga masih dialami komunitas adat bersangkutan sampai saat ini. Media siber secara rutin melaporkan konflik komunitas adat bersangkutan terkait isu ini.

Sepanjang 2020 hingga 2022, terdapat sekitar 113 berita dari berbagai media siber terkait konflik pembangunan lahan pemakaman tokoh masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur. Berita-berita tersebut terdapat pada media-media siber lokal tingkat kabupaten dan kota, provinsi, nasional maupun internasional. Empat media internasional berbahasa Indonesia yakni bbc.com, dw.com (Deutchwelle dari Jerman), cnnindonesia.com (milik kelompok CTCorp/pengusaha Chairul Tanjung) dan voa.indonesia yang merupakan bagian dari Voice of America (Amerika Serikat) melakukan liputan langsung terkait Sunda Wiwitan. Media-media siber nasional, seperti Suara.com, Kompas.com, Detik.com dan beberapa media siber lokal seperti Pikiranrakyat.com menulis lebih dari sekali dengan narasumber yang beragam terkait konflik lahan komunitas adat Sunda Wiwitan.

Jumlah dan variasi berita ini menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya menjadi perhatian lokal tetapi juga menarik perhatian yang lebih luas. Empat media internasional berbahasa Indonesia, yakni bbc.com, dw.com (Deutsche Welle dari Jerman), cnnindonesia.com (milik kelompok CTCorp/pengusaha Chairul Tanjung), dan voa.indonesia (bagian dari Voice of America dari Amerika Serikat) melakukan liputan langsung terkait konflik ini. Keterlibatan media dari berbagai negara menunjukkan bahwa konflik lahan yang melibatkan komunitas adat Sunda Wiwitan memiliki dimensi internasional dan relevansi yang cukup kuat untuk diliput oleh media global. Hal ini menandakan bahwa isu tersebut dapat mempengaruhi persepsi global mengenai hak asasi manusia dan hak-hak komunitas adat di Indonesia.

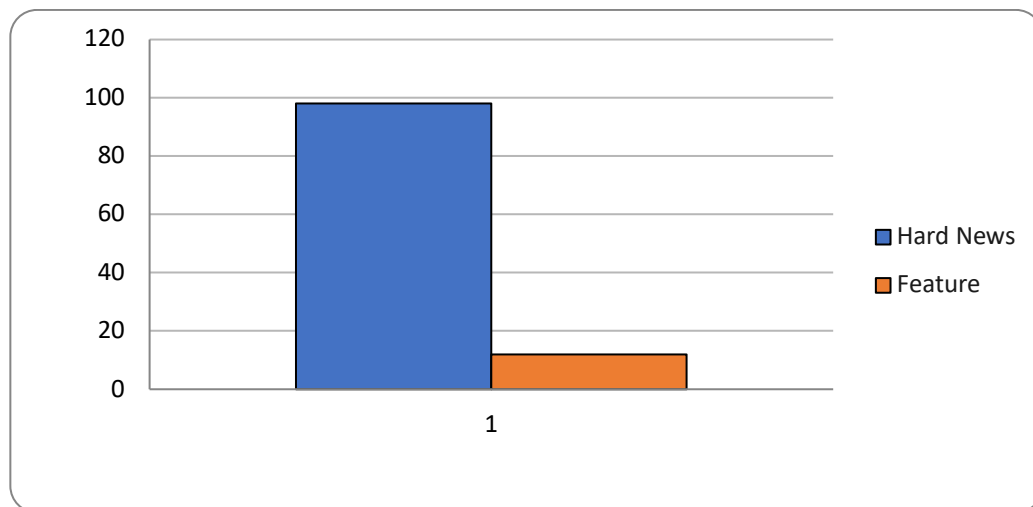
Media nasional seperti Suara.com, Kompas.com, dan Detik.com, serta media siber lokal seperti Pikiranrakyat.com juga terlibat aktif dalam liputan konflik ini. Media-media tersebut menulis lebih dari sekali tentang isu ini dengan melibatkan narasumber yang beragam. Ini mencerminkan bahwa konflik lahan komunitas adat Sunda Wiwitan dianggap sebagai topik penting yang memerlukan perhatian berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Ketertarikan jurnalis dan media besar terhadap isu ini menunjukkan bahwa konflik tersebut dipandang sebagai isu penting yang perlu diangkat ke publik. Penggunaan narasumber yang beragam oleh media-media ini menunjukkan upaya untuk memberikan liputan yang komprehensif dan berimbang, serta untuk memahami berbagai perspektif terkait konflik ini.

Secara keseluruhan, liputan yang luas dan intensif terhadap konflik lahan pemakaman tokoh masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur menunjukkan bahwa isu ini memiliki signifikansi yang tinggi, terutama dalam konteks hak-hak komunitas adat dan pengelolaan lahan. Peran media dalam meliput konflik ini sangat penting dalam membangun kesadaran publik tentang isu-isu yang dihadapi oleh komunitas adat. Liputan media dapat membantu memperkuat suara komunitas yang terdampak dan meningkatkan tekanan untuk penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Media siber lebih tertarik berita-berita buruk (*bad news*) dengan nilai-nilai berita (*news values*), seperti konflik dan keterlibatan pejabat negara, daripada berita-berita baik (*good news*), yang mengandung unsur kerjasama, cinta, dan lain-lain (McIntyre, 2016). Berita-berita seputar konflik diminati khalayak dan dapat memancing emosi dan empati sehingga menarik keterlibatan masyarakat.

Sebanyak 98 artikel dari keseluruhan artikel ditulis dalam bentuk berita langsung dan pendek (*hardnews*) atau 86 persen dari keseluruhan berita, 12 artikel yang lebih panjang dan mendalam (*features*) atau sekitar 10 persen dan sisanya berbentuk opini. Hal ini menunjukkan media siber lebih mengutamakan berita-berita pendek daripada berita Panjang dan mendalam sebagaimana sesuai karakteristik pembaca media siber yang lebih menyukai berita berita pendek.



Gambar 1: Grafik Bentuk Tulisan Berita Konflik Lahan Sunda Wiwitan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Informan peneelitian yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Suwardjono menyatakan kepada peneliti bahwa pembaca media siber memang lebih memilih berita-berita pendek dari pada berita-berita Panjang dan mendalam.

“Berita-berita receh ini banyak pembacanya,” kata Suwardjono, yang juga pemimpin redaksi suara.com, salah satu jaringan media siber berkantor pusat di Jakarta naum memiliki jaringan media siber di seluruh Indonesia.

Suwardjono mengatakan berita receh adalah istilah untuk berita-berita pendek dan ringan yang sebagian besar tidak bersentuhan dengan kepentingan publik, misalnya berita-berita hiburan tetang artis dan selebritas.

Namun, berita-berita features yang mendalam, menurut Suwardjono, tetap ada pembacanya, meskipun jauh lebih kecil dibandingkan berita-berita receh tersebut. “Menulis berita-berita Panjang dan mendalam ini juga termasuk pertanggungjawaban kami pada dunia jurnalistik.”

Suwardjono mengatakan, untuk tetap bisa bertahan, media siber akan tetap menulis berita-berita pendek yang disukai pembaca dan berpotensi menambah pemasukan bagi perusahaan media siber.

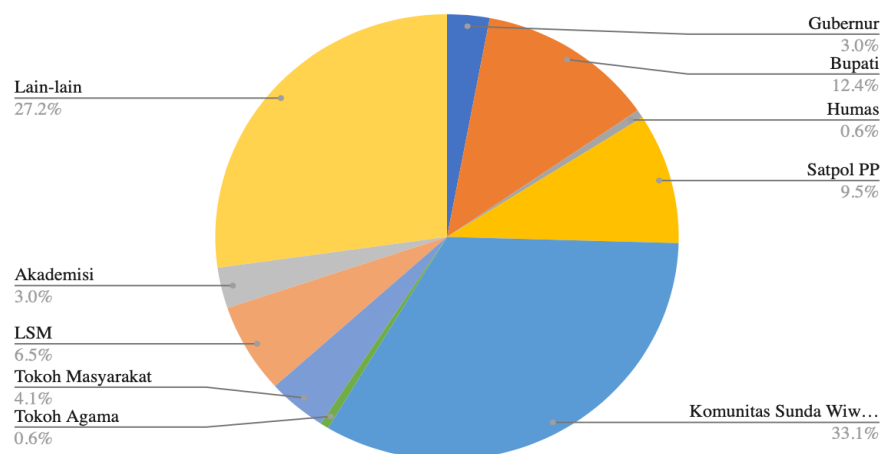
Informan penelitian ini, Uni Zulfiani Lubis, pemimpin redaksi IDN Times, mengatakan berita-berita panjang atau features tetap ada pembacanya. “Kami mewajibkan redaktur kamu membuat berita panjang atau kami menyebutnya *explainer*, minimal sebulan sekali.”

Uni menjelaskan berita panjang atau features atau *explainers* penting untuk memberikan latar belakang peristiwa yang sering tidak bisa didapatkan pembaca dari berita-berita pendek (*hardnews*).

Ketertarikan media siber terhadap konflik Sunda Wiwitan juga terlihat dari liputan yang lebih dari satu kali. Suara.com menulis berita terkait konflik Sunda Wiwitan sebanyak tujuh artikel mulai tahun 2020 sampai 2022. Kompas.com menurunkan berita terkait konflik lahan Sunda Wiwitan sebanyak enam kali. IDN Times menurunkan berita sebanyak dua kali.

Selain jumlah berita dan bentuk penulisan, penelitian ini juga melihat beragamnya narasumber yang diwawancarai jurnalis dalam meliput konflik Sunda Wiwitan. Sebanyak 110 berita terkait, tiga persen diantaranya mewawancarai atau mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Kuningan sebanyak 12.4 persen, Kepala Satpol PP Kuningan 9.5 persen, Komunitas Sunda Wiwitan sebanyak 33.1 persen, akademisi 3 persen, LSM 6.5 persen, Tokoh Masyarakat 4.1 persen, Tokoh Agama 0.6 persen, kepala hubungan masyarakat 0.6 persen dan lain-lain 27.2 persen.

Narasumber



Gambar 2: Grafik Persentase Beragam Narasumber dalam Berita Konflik Lahan Sunda Wiwitan
 (Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Penelitian ini menunjukkan bahwa liputan media mengenai konflik Sunda Wiwitan melibatkan beragam narasumber, mencakup berbagai perspektif dari otoritas pemerintah, komunitas terdampak, akademisi, LSM, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Keragaman narasumber ini penting untuk memberikan liputan yang komprehensif dan berimbang, memastikan bahwa berbagai sudut pandang terwakili dalam pemberitaan konflik ini.

Sebagian Narasumber menyatakan keprihatinan atas konflik lahan masyarakat adat Sunda Wiwitan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengambil sikap sebagai pihak yang mendorong jajaran pemerintah untuk menghentikan segala proses penyegehan. Hal ini sejajar dengan pandangan komunitas aktivis yang tergabung dalam persatuan yang dikenal sebagai Masyarakat Cirebon Anti Diskriminasi, yakni Fahmina Institute, Institut Studi Islam Fahmina, Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan (Jancuk), Cirebon Feminist, dan sebagainya. Mereka menandatangani pernyataan sikap yang mengkritik sikap pemerintah lokal terhadap Komunitas Sunda Wiwitan, dan menghimbau mayoritas untuk melindungi kebebasan berekspresi kaum minoritas.

Selaku partai yang mengusung Bupati Kuningan Acep Purnama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyayangkan sikap kadernya terhadap kaum minoritas. Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono menyampaikan permohonan maaf dan simpati terhadap Masyarakat Sunda Wiwitan. Selain itu, PDIP Jabar juga mengeluarkan instruksi terhadap Bupati Kuningan Acep Purnama untuk mengangkat status resmi Sunda Wiwitan sebagai Komunitas Adat, serta menegakkan hak-hak komunal atas tanah sebagai Masyarakat Adat. Kanti W Janis, Anggota Badan Penelitian dan Pengembangan PDIP, menganggap bahwa pejabat daerah lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas pemenuhan hak masyarakat, serta menyayangkan sikap Pemda Kuningan yang ia anggap bekerjasama dengan “Preman Pembajak Agama”, yakni komunitas-komunitas yang turut mendukung keputusan pemerintah untuk melakukan penyegehan seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), Gardah, Markaz Harokah Aswaja, dan Harokatul Muslimin. Selaku partai yang mengusung Kanti W Janis, PDIP Jabar juga turut mengeluarkan instruksi terhadap Bupati Kuningan Acep Purnama untuk menegakkan hak-hak komunal atas tanah sebagai Masyarakat Adat.

Secara keseluruhan, media, dengan mengutip beragam narasumber, menggambarkan solidaritas dari berbagai pihak, termasuk lembaga hak asasi manusia, komunitas aktivis, dan partai politik terhadap masyarakat adat Sunda Wiwitan. Komnas HAM dan komunitas aktivis menekankan pentingnya menghentikan penyegehan dan melindungi hak-hak minoritas. PDIP menunjukkan keprihatinan terhadap tindakan kadernya dan memberikan instruksi untuk memperbaiki keadaan, dengan tujuan mengakui hak-hak komunal dan status resmi Sunda Wiwitan sebagai komunitas adat. Kritik internal dari anggota PDIP juga menyoroti ketidakpuasan terhadap prioritas pejabat daerah yang dianggap mengutamakan kepentingan pribadi.

Hubungan Jurnalis dan Narasumber

Pemilihan narasumber utama dalam sebuah pemberitaan merupakan faktor yang sangat penting (Loisa, 2019). Narasumber yang relevan dengan tema berita menjadikan berita lebih kredibel dan akurat. Narasumber yang terpercaya dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap berita yang disajikan media. Dengan mengutip pernyataan-pernyataan dari narasumber-narasumber yang otoritatif juga bisa mempengaruhi agenda dan kebijakan publik.

Narasumber dari pihak komunitas adat Sunda Wiwitan atau sebagai pihak korban dalam konflik lahan ini mencapai 33 persen dari 113 berita yang berhasil dikumpulkan sepanjang 2020-2022. Dari hasil wawancara dengan jurnalis dan komunitas Sunda Wiwitan menunjukkan adanya hubungan yang cukup lama dan mendalam yang terjadi jauh sebelum konflik terjadi. Hubungan yang terjadi antara jurnalis, redaktur dan pimpinan media dengan narasumber berpengaruh dalam menentukan agenda dan framing media.

Pemimpin Redaksi IDNTimes.com Uni Zulfiani Lubis mengatakan dirinya mengenal pimpinan komunitas Sunda Wiwitan dan beberapa kali bertemu dalam beberapa kesempatan di Jakarta. "Saya kenal. Kalau ada kasus, ya saya tugaskan reporter untuk menulis."

Suwardjono mengatakan wartawan Suara.com di Jawa Barat telah mengenal narasumber dari pihak Sunda Wiwitan. "Wartawan kami cukup mengenal komunitas Sunda Wiwitan. Mereka sebagian bekas aktifis, jadi ada ketertarikan dalam isu ini."

Sementara itu, informan dalam penelitian ini, Dewi Kanti, pimpinan masyarakat Sunda Wiwitan, mengakui pihaknya sudah cukup lama memiliki hubungan baik dengan jurnalis dan organisasi-organisasi non-pemerintah, termasuk Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), serta Komnas HAM. "Kami banyak dibantu Sejuk menghubungkan dengan teman-teman media," Kata Dewi yang merupakan salah satu putri Pangeran Jatikusumo, pimpinan tertinggi masyarakat adat Sunda Wiwitan. Pangeran Jatikusumah adalah cucu Madrais, pendiri kepercayaan Sunda Wiwitan.

Jurnalis juga mewawancarai narasumber lain seperti komisioner Komnas HAM, Gubernur Jawa Barat dan aktifis dengan agenda media dan mempengaruhi agenda publik yang akhirnya menjadi kebijakan publik dengan menghentikan konflik.

Banyaknya liputan media mengenai konflik Sunda Wiwitan, membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan pernyataan dan dikutip beberapa media nasional dan lokal. Ridwan Kamil meminta pemerintah Kabupaten Kuningan untuk tidak melakukan penyegelan sepihak.

Dewi mengatakan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan komunitas Sunda Wiwitan, seperti pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Ratu Hemas, turut berbicara di media dan meminta penyegelan lahan makam.

Ratu Hemas yang juga istri Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X, mengunjungi lahan makam yang disegel pemerintah Kabupaten Kuningan dan menyatakan keprihatinannya atas tindakan aparat. Beberapa media siber, seperti

detik.com, liputan6.com, tribunnews.com dan kbr.id, meliput kedatangan Ratu Hemas dan memuat pernyataan keprihatinannya.

Dewi yang bersuamikan mantan jurnalis Harian Kompas menjelaskan pentingnya berhubungan baik dengan media jauh sebelum, saat dan sesudah konflik terjadi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

“Kami punya kliping-kliping media yang meliput tentang Sunda Wiwitan. Kami juga punya kontak-kontak dengan wartawan-wartawan yang pernah meliput kami. Hubungan dengan wartawan tidak hanya kami lakukan ketika terjadi kasus penyerangan, tapi pada banyak kesempatan.”

Secara keseluruhan, berita-berita dan wawancara dengan informan menunjukkan peran penting tokoh masyarakat dan media dalam menangani konflik pembangunan lahan pemakaman komunitas Sunda Wiwitan. Dewi menyatakan bahwa beberapa tokoh masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan komunitas Sunda Wiwitan, seperti pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Ratu Hemas, turut berbicara di media dan meminta penyegelan lahan makam. Ratu Hemas, yang juga istri Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X, menunjukkan dukungannya dengan mengunjungi lahan makam yang disegel oleh pemerintah Kabupaten Kuningan dan menyatakan keprihatinannya atas tindakan aparat. Keterlibatan tokoh masyarakat seperti Ratu Hemas memperlihatkan bahwa konflik ini menarik perhatian tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga dari tokoh-tokoh berpengaruh yang memiliki kapasitas untuk menggerakkan opini publik dan mempengaruhi kebijakan.

Dewi, yang bersuamikan mantan jurnalis Harian Kompas, menjelaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan media jauh sebelum, saat, dan sesudah konflik terjadi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pernyataannya menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang strategi komunikasi yang efektif dalam konflik. Dengan menjaga hubungan baik dengan media, komunitas Sunda Wiwitan dapat memastikan bahwa isu-isu mereka tetap menjadi perhatian publik dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Hubungan yang terjalin baik dengan wartawan tidak hanya dilakukan ketika terjadi kasus penyerangan, tetapi juga pada banyak kesempatan lainnya.

Dewi juga menyebutkan bahwa mereka memiliki kliping-kliping media yang meliput tentang Sunda Wiwitan dan kontak dengan wartawan-wartawan yang pernah meliput mereka. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas Sunda Wiwitan secara proaktif mengelola hubungan dengan media sebagai bagian dari strategi komunikasi jangka panjang mereka. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dan isu-isu mereka terus diperhatikan oleh publik dan pembuat kebijakan.

Simpulan

Konflik lahan komunitas adat Sunda Wiwitan banyak mendapatkan perhatian media, termasuk media siber. Sebanyak 113 berita terkait konflik lahan Sunda Wiwitan dimuat media-media cyber sepanjang 2020-2022. Ketertarikan media siber akan konflik lahan Sunda Wiwitan ditunjukkan dengan beberapa media siber yang menulis lebih dari sekali terkait konflik tersebut dan dengan

mewawancarai beragam narasumber, mulai dari pejabat negara sampai dengan anggota komunitas Sunda Wiwitan. Penelitian ini juga menunjukkan karakteristik media siber yang lebih banyak memproduksi berita-berita pendek (*hard news*) dari pada berita-berita Panjang dan mendalam (*features*) sebagaimana dalam peliputan konflik lahan Sunda Wiwitan yang sebagian besar berita ditulis dalam bentuk berita pendek (86%) dan sedikit dalam bentuk tulisan panjang (10 %).

Banyaknya liputan yang menggunakan narasumber dari korban yakni komunitas Sunda Wiwitan (33.1 %) dan narasumber lain, seperti komisioner Komnas HAM, aktifis, akademisi, dan lain-lain yang mendorong penghentian penyegelan tidak terlepas dari hubungan antara jurnalis dan narasumber. Jurnalis yang mengenal narasumber atau korban menulis berita dengan agenda media dan mempengaruhi kebijakan publik yakni penghentian penyegelan lahan komunitas lahan Sunda Wiwitan.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya korban sebagai narasumber untuk menjalin hubungan dengan media dan jurnalis, agar mendapatkan perhatian dan pemberitaan yang kemudian berpengaruh dalam kebijakan publik. Hubungan korban dengan jurnalis dan media tidak hanya terjadi saat konflik berlangsung, tetapi dilakukan terus sebelum dan sesudah kejadian atau peristiwa konflik. Korban atau komunitas juga menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat, aktifis dan akademisi yang mendukung komunitas yang juga bisa menjadi narasumber bagi media dan jurnalis.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada pimpinan dan anggota komunitas adat Sunda Wiwitan, Cigugur Kuningan, Jawa Barat dan jurnalis-jurnalis media cyber nasional dan lokal yang bersedia diwawancarai untuk penelitian ini. Terimakasih juga kepada dosen-dosen Institut Pertanian Bogor yang membantu dan mendorong terselesaikannya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- amsi.or.id. (2019). *Dari 47 Ribu, Baru 2.700 Media Online Terverifikasi Dewan Pers*. Diakses 15 Februari 2023.
- Atanesyan, A. (2020). Media Framing on Armed Conflicts: Limits of Peace Journalism on the Nagorno-Karabakh Conflict. *Journal of Intervention and Statebuilding*, 14(4), 534–550. <https://doi.org/10.1080/17502977.2020.1780018>
- Bbc.indonesia.com. (2020). *Sunda Wiwitan: Pembangunan makam dilarang karena “khawatir musyrik”, masyarakat adat keluhkan ‘diskriminasi di rumah sendiri*. Diakses 20 Juni 2021.
- Christensen, B., & Khalil, A. (2023). Reporting Conflict from Afar: Journalists, Social Media, Communication Technologies, and War. *Journalism Practice*, 17(2), 300–318. <https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1908839>

- Cruikshank, S. A. (2018). Cheaper than a goat: U.S. newspaper and television coverage of the Southern Sudan conflict. *Newspaper Research Journal*, 39(2), 220–231. <https://doi.org/10.1177/0739532918775679>
- Geiß, S. (2022). The Agenda-Setting-Effects of News Factor Exposure: A Field Study Comparing the Transmission Paths and Impact of Issue Exposure and News Factor Exposure. *SAGE Open*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/21582440221091259>
- Herfroy-Mischler, A. (2015). Silencing the agenda? Journalism practices and intelligence events: A case study. In *Media, War and Conflict* (Vol. 8, Issue 2, pp. 244–263). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/1750635215584285>
- Koltsova, O. , & P. S. (2020). Agenda divergence in a developing conflict: Quantitative evidence from Ukrainian and Russian TV newsfeeds. *Media, War & Conflict*.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th edition). Sage Publications.
- Liliweri, A. (2018). *Prasangka, Konflik dan Komunikasi Antar Budaya*. Prenada Media.
- Loisa, R. S. EH. , J. A. , dan L. F. (2019). Media Siber, Aparat, dan Pemberitaan Keberagaman. *Jurnal AspiKom*.
- Lynch, J. M. A. (2005). *Peace Journalism*. Hawthorn Press.
- Massey, Z. B., & Miller, C. H. (2018). Case studies on interethnic conflict: A theoretical integration. In *International Journal of Intercultural Relations* (Vol. 66, pp. 130–147). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.04.006>
- McIntyre, K. (2016). What makes “good” news newsworthy? *Communication Research Reports*, 33(3), 223–230. <https://doi.org/10.1080/08824096.2016.1186619>
- Merdeka.com. (2020). *Kisah Pangeran Madrais, Pendiri Agama Sunda Wiwitan di Jawa Barat*.
- Regus UNIKA St Paulus Ruteng, M. (2020). Interreligious Conflicts in Post-Authoritarian Indonesia: Assumptions, Causes, and Implications. *Jurnal Politik*, 5(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.1013>
- Romli, A. Syamsul. (2020). *Jurnalistik Online*.
- Şahin, S. (2022). Journalism in conflict-affected societies: Professional roles and influences in Cyprus. *Media, War and Conflict*, 15(4), 553–569. <https://doi.org/10.1177/1750635220987746>
- Suryana, A. (2018). Indonesian presidents and communal violence against non-mainstream faiths. *South East Asia Research*, 26(2), 147–160. <https://doi.org/10.1177/0967828X18769393>
- Susanto, E. H., Loisa, R., & Junaidi, A. (2020). Cyber media news coverage on diversity issues in Indonesia. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 30(4), 510–524. <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1708525>
- Teguh Irfan. (2017). *Mengenal Sunda Wiwitan dan Agama Sunda yang Lain* . Tirto.Id.

Ahmad Junaidi, Sarwititi Sarwoprasodjo, Didik Suharjito, Ika Yuliasari:
Journalist-Victim Relationship: Analysis of Cyber Media Reporting on the Land Conflict of the
Sunda Wiwitan Indigenous Community
Hubungan Jurnalis-Korban: Analisis Pemberitaan Media Siber tentang Konflik Lahan Masyarakat
Adat Sunda Wiwitan

Tyson, A. (2013). Vigilantism and Violence in Decentralized Indonesia. *Critical Asian Studies*.